



PERAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN) DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN TINGGI BAGI MASYARAKAT DI KALIMANTAN TENGAH

THE ROLE OF STATE ISLAMIC RELIGIOUS UNIVERSITIES IN EQUALIZING HIGHER EDUCATION FOR THE COMMUNITY IN CENTRAL KALIMANTAN

Naskah diterima: 15 Juni 2024 | Revisi: 15 Juni – 30 Desember 2024 | Disetujui: 31 Desember 2024

**Ibnu Hasan
Karbila**

Institut Agama Islam
Negeri Palangka Raya

Email: Ibnu.hasan06@yahoo.com

Abstrak

Policy Paper ini menguraikan bahwa pendidikan tinggi merupakan pilar utama dalam mencekik sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan mampu mendorong pembangunan nasional secara berkelanjutan. Kondisi yang belum selaras selaras terjadi di Kalimantan Tengah dimana Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi pada tahun 2024 masih tergolong rendah, yaitu sebesar 27,49%. Rendahnya APK ini mencerminkan ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Faktor yang menyebabkan rendahnya angka tersebut antara lain kondisi Geografis dan Aksesibilitas, Kondisi Sosial Ekonomi, Minimnya Lembaga Pendidikan Tinggi, Budaya dan Kesadaran Pendidikan serta Kurangnya Informasi dan Pendampingan. Problem statement dalam *Policy Paper* ini adalah Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat di Kalimantan Tengah. Penulisan *Policy Paper* ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kalimantan Tengah bekerja di sektor informal dan pertanian menjadikan penghasilan masih rendah serta rentan terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi yang berdampak pada rendahnya Angka Partisipasi Kasar. Pilihan kebijakan yang ditawarkan dalam *Policy Paper* ini untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pembuatan juknis perluasan program afirmasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang diharapkan menjadi solusi dan alternatif kebijakan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rendahnya partisipasi pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Pemerataan Pendidikan, Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi

Abstract

This policy paper explains that higher education is the main pillar in producing superior, competitive human resources (HR), and able to drive sustainable national development. Conditions that are not yet in harmony occur in Central Kalimantan where the Gross Participation Rate for higher education in 2024 is still relatively low, which is 27.49%. This low Gross Participation Rate reflects the inequality of access to education between urban and rural areas. Factors that cause this low figure include Geographical and Accessibility conditions, Socio-Economic Conditions, Lack of Higher Education Institutions, Culture and Awareness of Education and Lack of Information and Assistance. The problem statement in this Policy Paper is the Socio-Economic Conditions of the community in Central Kalimantan. The writing of this Policy Paper uses a descriptive qualitative method, the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results show that the majority of the population of Central Kalimantan works in the informal and agricultural sectors, making income still low and vulnerable to social and economic inequality which has an impact on the low Gross Participation Rate. The policy options offered in this Policy Paper to overcome this problem are by creating technical guidelines for expanding affirmative programs by the Directorate General of Islamic Education, which is expected to be the best solution and policy alternative in resolving the problem of low participation in higher education.

Keywords: Equalization of Education, Higher Education, Universities

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi merupakan pilar utama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan mampu mendorong pembangunan nasional secara berkelanjutan (Humiaty & Budiarti, 2020). Meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah dicanangkan oleh pemerintah untuk memperluas akses ke pendidikan tinggi, kesenjangan partisipasi antardaerah masih menjadi tantangan serius. Salah satu daerah yang menghadapi tantangan tersebut adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pendidikan tinggi tidak hanya meningkatkan potensi pendapatan individu tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan sosial, memperbaiki kualitas hidup, dan membuka akses ke pekerjaan yang lebih stabil

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah pada tahun 2023 hanya sebesar 26,95%. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM), yang mengukur persentase penduduk usia ideal kuliah (19–23 tahun) yang benar-benar sedang menempuh pendidikan tinggi, tercatat sebesar 14,99% pada tahun 2023 (BPS Kalimantan Tengah, 2023).

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta (69,58%), DIY (66,22%), dan Jawa Barat (35,31%) pada tahun yang sama. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa ada hambatan struktural dan kultural yang mempengaruhi akses masyarakat Kalimantan Tengah terhadap pendidikan tinggi.

Tabel 1. APM menurut Kabupaten/Kota jenis kelamin dan jenjang pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Kab/Kota	SD (%)	SMP (%)	SMA (%)	PT (%)
Kotawaringin Barat	99,16	81,55	54,78	11,39
Kotawaringin Timur	99,48	80,71	50,74	11,39
Kapuas	99,77	74,70	21,12	18,61
Barito Selatan	99,39	85,99	53,49	15,34
Barito Utara	99,38	82,29	62,12	9,35
Sukamara	99,79	70,15	59,80	10,18
Lamandau	98,28	82,47	59,57	8,41
Seruyan	99,94	80,50	52,45	10,44
Katingan	99,88	78,14	65,70	11,61
Pulang Pisau	99,02	76,40	52,52	9,95
Gunung Mas	99,79	81,50	46,52	10,25
Barito Timur	99,98	77,76	64,08	6,96
Murung Raya	98,97	82,11	56,77	4,49
Palangka Raya	98,46	76,05	64,08	35,40
Kalimantan Tengah	99,05	79,07	55,63	14,99

Sumber: BPS, Susenas 2023

Sama seperti indikator sebelumnya, ketimpangan pada level kewilayahan terasa sangat nyata utamanya pada APM perguruan tinggi, di mana proporsi APM perdesaan (10,93 persen) hanya mencapai setengah dari APM perguruan tinggi di perkotaan (20 persen). Begitu pula dengan ketimpangan dari segi status ekonomi rumah tangga di mana hanya sekitar 12,46 persen saja penduduk usia 19–23 tahun dari golongan ekonomi terbawah yang dapat bersekolah tepat waktu pada jenjang perguruan tinggi.

Tabel 2. APM Menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, Status Ekonomi Rumah Tangga, dan Jenjang Pendidikan Kalimantan Tengah, 2023

Karakteristik Demografi	Jenjang Pendidikan			
	SD (%)	SMP (%)	SMA (%)	PT (%)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	99,06	77,74	54,91	12,78
Perempuan	99,04	80,47	56,36	17,45
Daerah Tempat Tinggal				
Perkotaan	98,93	81,49	59,75	20,00
Perdesaan	99,14	77,21	52,43	10,93
Status Ekonomi Rumah Tangga				
40 Persen Terbawah	99,32	83,59	49,56	12,46

40 Persen Menengah	98,61	75,33	59,68	14,50
20 Persen Teratas	99,30	75,15	63,04	21,69
Total	99,05	79,07	55,63	14,99

Sumber: BPS, Susenas 2023

Rendahnya APM ini mencerminkan ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di daerah pedesaan, banyak penduduk hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar atau menengah pertama. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas pendidikan, jarak yang jauh ke perguruan tinggi, dan kurangnya informasi mengenai pentingnya pendidikan tinggi.

Minimnya minat lulusan SMA untuk melanjutkan ke perguruan tinggi juga menjadi perhatian. Banyak lulusan SMA yang lebih memilih bekerja di sektor informal atau perkebunan karena dianggap lebih cepat menghasilkan pendapatan, meskipun tidak menjamin kestabilan ekonomi jangka panjang.

Adapun Faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi pendidikan tinggi antara lain:

1. Geografis dan aksesibilitas

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi terluas di Indonesia, dengan luas wilayah sekitar 153.564 km². Wilayah ini memiliki topografi yang beragam mulai dari daerah aliran sungai besar, hutan hujan tropis, lahan gambut, hingga daerah pedalaman yang terpencil dan belum sepenuhnya terhubung dengan infrastruktur modern. Kondisi geografis ini menciptakan tantangan besar dalam aksesibilitas, khususnya dalam hal akses ke layanan pendidikan menengah dan tinggi.

Sebaran penduduk Kalimantan Tengah tidak merata. Sebagian besar masyarakat tinggal di desa-desa yang jauh

dari pusat kota atau ibu kota provinsi, Palangka Raya. Berdasarkan data BPS, lebih dari 75% penduduk Kalimantan Tengah tinggal di daerah perdesaan. Jalan-jalan penghubung antar kecamatan dan kabupaten masih banyak yang belum beraspal atau rusak berat, khususnya di musim hujan yang bisa menyebabkan banjir dan mengganggu transportasi darat.

Karena kondisi jalan yang belum memadai, banyak daerah di Kalimantan Tengah mengandalkan transportasi sungai. Namun, transportasi sungai tidak selalu efisien dan tergantung pada cuaca. Biaya perjalanan melalui jalur air juga tidak murah, dan menjadi beban tambahan bagi keluarga yang ingin menyekolahkan anaknya ke kota tempat perguruan tinggi berada.

Akibat kondisi geografis yang menantang dan akses transportasi yang terbatas:

- Banyak lulusan SMA/SMK yang menurunkan niat untuk kuliah karena lokasi kampus terlalu jauh dan tidak terjangkau.
- Biaya transportasi dan akomodasi menjadi penghalang utama, selain biaya kuliah itu sendiri.
- Peluang untuk mengikuti sosialisasi atau informasi tentang jalur masuk perguruan tinggi juga lebih kecil bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil.

2. Kondisi sosial ekonomi

Sebagian besar penduduk Kalimantan Tengah bekerja di sektor informal seperti pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Keterbatasan ekonomi membuat banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka

di perguruan tinggi, terlebih jika harus merantau ke kota besar (BPS Kalimantan Tengah, 2023).

Biaya pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan oleh seseorang dalam membuat keputusan melanjutkan pendidikan tinggi. Hal ini berkaitan erat dengan faktor pendapatan orang tua maupun penghasilan keluarga yang dapat menopang biaya

pendidikan yang relatif mahal. Seseorang perlu memperhitungkan kemampuan diri sendiri dan keluarganya dalam membiayai kebutuhan selama melanjutkan pendidikan. Faktor ini menjadi penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang dalam melanjutkan pendidikan tinggi (Guntoro & Sholekhah, 2023).

3. Minimnya lembaga pendidikan tinggi
Ketersediaan lembaga pendidikan tinggi merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tingkat lanjut. Di Kalimantan Tengah, jumlah perguruan tinggi masih sangat terbatas, baik secara kuantitas, distribusi wilayah, maupun kapasitas dan kualitas, sehingga berkontribusi besar terhadap rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan tinggi.

Berdasarkan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) tahun 2024 Kalimantan Tengah hanya memiliki sekitar 27 perguruan tinggi aktif, yang terdiri dari. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan provinsi seperti Jawa Tengah (300+ PT), Jawa Barat (500+ PT), atau Sulawesi Selatan (100+ PT), sehingga daya tampung

sangat terbatas dan tidak proporsional dengan jumlah lulusan SMA/SMK setiap tahun.

Sebagian besar perguruan tinggi di Kalimantan Tengah terpusat di Kota Palangka Raya. Beberapa kabupaten besar seperti Kotawaringin Timur (Sampit), Kapuas, dan Barito Selatan memiliki 1–2 perguruan tinggi swasta, namun sisanya tidak memiliki lembaga pendidikan tinggi sama sekali.

Minimnya lembaga pendidikan tinggi berdampak pada Rendahnya daya tampung, yang menyebabkan banyak lulusan SMA/SMK tidak mendapat tempat kuliah meskipun berminat. Selain itu Kurangnya motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan, karena merasa tidak ada pilihan program studi yang sesuai.

4. Faktor budaya dan kesadaran pendidikan

Dalam sejumlah komunitas lokal, terutama di daerah pedesaan dan adat, pendidikan tinggi belum menjadi prioritas. Banyak siswa yang memilih untuk langsung bekerja atau menikah setelah lulus SMA/SMK karena dianggap lebih realistis secara ekonomi (Kemendikbudristek, 2023).

Budaya lokal dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tinggi berperan besar dalam keputusan untuk melanjutkan pendidikan pasca-sekolah menengah. Di Kalimantan Tengah, faktor ini sering kali menjadi hambatan non-struktural yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman dan adat.

Di beberapa komunitas adat dan pedesaan di Kalimantan Tengah, pendidikan

belum dianggap sebagai jalan utama untuk meningkatkan kualitas hidup. Banyak keluarga lebih memprioritaskan keterlibatan anak dalam pekerjaan produktif seperti berkebun, berburu, atau membantu ekonomi rumah tangga daripada melanjutkan ke jenjang kuliah (BPS, 2022a).

Masih tingginya angka pernikahan usia muda di Kalimantan Tengah juga berpengaruh terhadap partisipasi pendidikan tinggi, terutama di kalangan perempuan. Anak perempuan yang menikah muda cenderung berhenti sekolah dan mengalihkan fokus ke peran domestik. Menurut data BKKBN Kalimantan Tengah (2023), sekitar 23% remaja perempuan usia 15–19 tahun pernah atau sedang menikah, angka yang lebih tinggi dari rata-rata nasional (Kemendikbudristek, 2023).

Minimnya jumlah lulusan perguruan tinggi yang kembali ke desa atau menjadi panutan di lingkungan lokal membuat inspirasi untuk melanjutkan pendidikan menjadi lemah. Siswa tidak melihat contoh langsung bahwa pendidikan tinggi bisa mengubah masa depan.

Hal ini juga diamini dalam hasil studi LIPI (2021) yang menyebut bahwa kurangnya figur akademik dalam komunitas lokal menyebabkan rendahnya aspirasi anak-anak terhadap perguruan tinggi.

Banyak keluarga menganggap bahwa kuliah tidak menjamin pekerjaan, atau membutuhkan biaya tinggi dengan hasil yang tidak sepadan. Hal ini memicu sikap pragmatis: lebih baik langsung bekerja setelah lulus SMA/SMK daripada membayar biaya kuliah dan hidup di kota.

Sikap ini diperkuat oleh data Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas, 2022 yang menunjukkan bahwa alasan utama tidak kuliah setelah SMA/SMK di Kalimantan Tengah adalah “tidak mampu secara ekonomi” (42%) dan “tidak berminat atau tidak melihat manfaatnya” (29%).

5. Kurangnya informasi dan pendampingan

Akses terhadap informasi seputar perguruan tinggi, jalur masuk, dan beasiswa masih minim di banyak sekolah. Bimbingan konseling yang lemah membuat siswa tidak mendapat arahan yang memadai tentang peluang pendidikan tinggi, termasuk program seperti KIP Kuliah.

Ketersediaan informasi dan pendampingan yang memadai sangat krusial dalam membantu siswa, terutama dari daerah tertinggal dan keluarga tidak mampu, untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sayangnya, banyak siswa di Kalimantan Tengah tidak mendapat akses informasi yang cukup, baik terkait peluang kuliah, beasiswa, maupun proses pendaftaran.

Berdasarkan data Kemendikbudristek, (2021), masih banyak sekolah menengah, khususnya di daerah perdesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah, tidak memiliki akses internet yang stabil, serta tidak menyediakan layanan informasi khusus terkait:

- Jalur masuk perguruan tinggi (SNBP, SNBT, Mandiri).
- Program beasiswa (KIP Kuliah, Beasiswa Daerah, LPDP).
- Informasi tentang kampus dan program studi.

Di daerah maju seperti Jawa dan Bali, banyak tersedia program bimbingan masuk PTN, seperti Bimbingan belajar gratis oleh komunitas atau lembaga, Program mentoring alumni untuk adik kelas dan Sosialisasi intensif dari kampus dan lembaga beasiswa. Di Kalimantan Tengah, akses ke program-program seperti ini sangat terbatas. Beberapa inisiatif seperti sosialisasi KIP Kuliah pun masih banyak tidak menjangkau daerah terpencil, karena keterbatasan SDM dan logistik (Indonesia Mengajar, 2021).

Walaupun beberapa informasi bisa diakses melalui situs resmi seperti SN-PMB, PDDikti, SPAN PTKIN atau Kemendikbud, namun Banyak siswa dan orang tua tidak terbiasa mengakses informasi secara digital dikarenakan tidak memiliki perangkat gawai/laptop yang memadai. Selain itu masih banyak siswa yang tidak paham cara menggunakan platform pendaftaran. Hal ini membuat banyak siswa tertinggal dalam informasi penting dan bahkan gagal mendaftar karena teknis (Kemkominfo, 2022).

Sekolah-sekolah unggulan di kota besar (misalnya di Palangka Raya) cenderung memiliki Guru BK yang aktif, akses ke program bimbingan masuk kuliah, jaringan alumni dan informasi yang luas Sedangkan sekolah di daerah pedalaman seperti di Kabupaten Barito Utara, Gunung Mas, atau Lamandau sering kali tidak memiliki jaringan informasi serupa, sehingga terjadi kesenjangan antarwilayah (Bappeda Provinsi Kalteng, 2023).

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan sebaran penduduk yang relatif tersebar dan banyak wilayah terpencil.

Keberadaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya menjadi salah satu titik krusial dalam memperluas akses pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi keagamaan Islam, bagi masyarakat di wilayah ini. Tanpa kehadiran perguruan tinggi negeri seperti IAIN, banyak calon mahasiswa harus menempuh pendidikan ke luar provinsi, yang secara ekonomi dan sosial tidak selalu memungkinkan.

IAIN Palangka Raya berperan sebagai institusi yang mendorong partisipasi pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah. Dengan berbagai program studi yang relevan dan terjangkau, lembaga ini memberikan peluang kepada masyarakat lokal terutama dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah untuk melanjutkan studi. Ini sangat penting mengingat tingkat partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di provinsi ini masih tergolong rendah dibandingkan wilayah Indonesia bagian barat.

Sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) di Kalimantan, IAIN Palangka Raya memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi keagamaan tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini sejalan dengan agenda nasional untuk pemerataan akses pendidikan tinggi, terutama dalam konteks pendidikan Islam yang inklusif dan moderat.

IAIN Palangka Raya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga akademik, tetapi juga sebagai pusat pengembangan masyarakat dan nilai-nilai keislaman yang moderat. Lulusannya banyak yang kembali mengabdikan sebagai guru, dai, tenaga pendidik, serta pegawai negeri di Kalimantan Tengah. Hal ini memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas SDM lokal serta mendorong pembangunan sosial dan kultural di daerah.

Di tengah keragaman budaya dan etnis di Kalimantan Tengah, IAIN Palangka Raya memiliki peran penting dalam mengembangkan kajian Islam yang kontekstual dan moderat, serta menjadi ruang dialog antar-agama dan antar budaya. Fungsi ini sangat penting dalam menjaga harmoni sosial dan mendorong integrasi nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan masyarakat.

Keberadaan IAIN Palangka Raya tidak hanya penting dalam konteks menyediakan pendidikan tinggi keagamaan, tetapi juga sebagai motor penggerak pemerataan pendidikan, peningkatan APK, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Di tengah tantangan geografis dan sosial di Kalimantan Tengah, institusi ini menjadi bukti konkret bahwa pendidikan tinggi dapat hadir dan berkembang di luar pusat-pusat urban besar.

Melalui peran dalam menjalankan tri Dharma perguruan tinggi, IAIN Palangka Raya dapat mengintegrasikan berbagai pendekatan dengan kekuatan lokal, seperti kultur masyarakat, geografi, dan sosial keagamaan dalam pemerataan pendidikan di Kalimantan Tengah yang sangat signifikan. Di bawah naungan Kementerian Agama, IAIN Palangka Raya tidak hanya tentang memahami teks-teks agama, tetapi juga tentang

bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan modern yang semakin kompleks. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip moderasi yang menjadi inti dari ajaran Islam, yang mempromosikan sikap tengah, keseimbangan dan harmoni dalam berbagai aspek kehidupan (Ardhy, 2024).

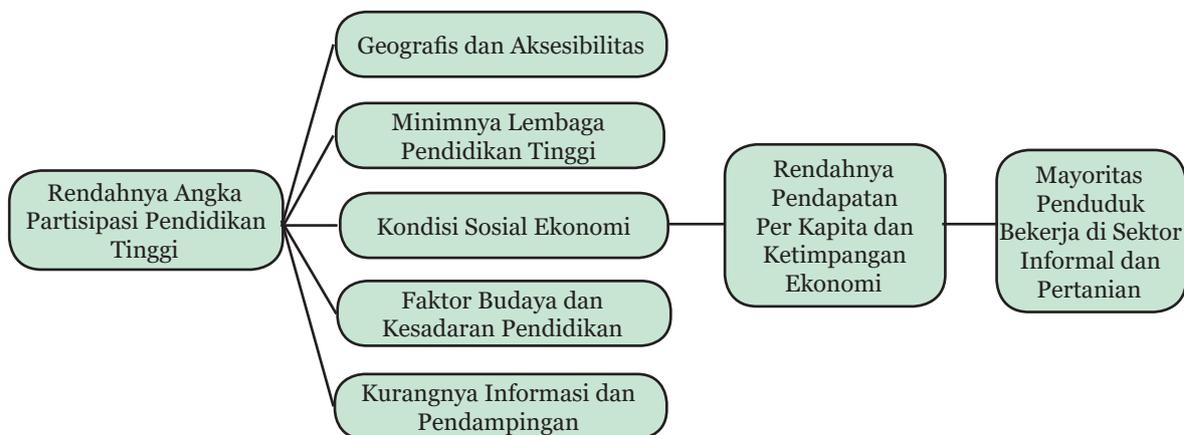
Identifikasi Masalah

Permasalahan terkait rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi secara global dipengaruhi oleh lima faktor berikut:

1. Geografis dan Aksesibilitas
2. Kondisi Sosial Ekonomi
3. Minimnya Lembaga Pendidikan Tinggi
4. Faktor Budaya dan Kesadaran Pendidikan
5. Kurangnya Informasi dan Pendampingan

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, permasalahan yang akan di kupas dalam penulisan paper ini adalah rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi, dari kelima faktor penyebab di atas akan ditentukan satu problem statemen dalam pembahasan policy paper ini. Secara garis besar rumusan masalah dalam penulisan paper ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Pohon Masalah Penulisan Policy Paper

Problem statement ditentukan dengan menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG), Penentuan Masalah Spesifik Prioritas dari masalah rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi

Acuan dalam menganalisis data menggunakan pendekatan *need assessment* dengan menentukan peringkat/ranking dan skor 1 sampai 5 sesuai dengan kebutuhan, yaitu:

1. *Urgency* (kemendesakan isu): masalah harus segera dipecahkan berkaitan dengan ketersediaan waktu.
2. *Seriousness* (kegawatan isu): seberapa serius suatu masalah dapat menimbulkan masalah lain yang lebih serius.
3. *Growth* (berkembangnya isu): kemungkinan masalah tersebut perkembangan semakin memburuk jika tidak ditanggulangi.

Tabel 3. Matrik USG Penentuan Masalah Spesifik Prioritas

Kriteria	U	S	G	Total
Geografis dan Aksesibilitas	3	4	4	11
Kondisi Sosial Ekonomi	4	4	4	12
Minimnya Lembaga Pendidikan Tinggi	4	4	3	11
Faktor Budaya dan Kesadaran Pendidikan	3	3	4	10
Kurangnya Informasi dan Pendampingan	4	3	3	11

Dari kelima akar masalah tersebut dan dengan menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG), maka yang menjadi *problem statement* adalah faktor kondisi sosial ekonomi.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan *Policy Paper* ini adalah menjembatani proses perencanaan dalam mendukung perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan

an tinggi. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah.
2. Menawarkan solusi atau strategi yang konkret dan relevan untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan dasar oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang program dan kegiatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi.

Kerangka Teoritis dan Konseptual

Teori William N. Dunn

Teori analisis kebijakan William N. Dunn memberikan pendekatan yang komprehensif dalam memahami dan mengevaluasi kebijakan publik. Dengan menggunakan metode dan kriteria yang telah dikembangkan, pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada umumnya sebuah nilai dapat dikritik dengan menanyakan secara mendalam sebuah kesiapan tujuan dan target. Menurut Dunn, 2003 terdapat 6 kriteria evaluasi kebijakan sebagai berikut:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu, dengan kata lain kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil.

3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur seberapa jauh alternative pilihan dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan.
4. Perataan, kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berdasar pada perataan adalah kebijakan yang usahanya secara adil dapat dirasakan.
5. Responsifitas yang memiliki makna berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya.
6. Ketepatan yang berarti bahwa apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Lembaga Pendidikan Tinggi

Partisipasi dalam pendidikan tinggi merupakan indikator utama pembangunan manusia dan daya saing suatu negara. Perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam menciptakan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi (Trow, 1973). Peran penting yang di emban Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Tinggi antara lain sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi sebagai pusat akses dan inklusi pendidikan
Perguruan tinggi memainkan peran sentral dalam menyediakan akses pen-

didikan lanjutan bagi lulusan sekolah menengah. Melalui kebijakan afirmasi, beasiswa, dan program vokasi, perguruan tinggi mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani, seperti masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), kelompok ekonomi lemah, serta penyandang disabilitas (“Glob. Educ. Monit. Rep. 2020 Incl. Educ. All Means All. Paris,” 2020)

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan memberikan pendidikan tingkat lanjut, perguruan tinggi berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas SDM yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Lulusan pendidikan tinggi cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi teknologi, dan keterampilan kerja yang lebih baik, yang sangat dibutuhkan di era Revolusi Industri 4.0 dan yang saat ini sedang siapkan adalah era society 5.0 dimana saat ini arus informasi teknologi semakin berkembang pesat. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021)

Peran Perguruan Tinggi juga sangat vital dalam membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing. Terdapat beberapa pilar untuk daya saing dalam kehidupan berbangsa yakni antara lain pilar ilmu pendidikan dan pengetahuan serta inovasi dalam suatu Negara yang dapat mempengaruhi tingkat laju daya saing bangsa. Pendidikan menjadi salah satu senjata yang strategis untuk memajukan kecerdasan generasi bangsa. Pendidikan juga diharapkan sebagai upaya mengatasi kemiskinan, kebodohan, pengangguran dan banyak hal yang

membuat Bangsa kita tertinggal jauh dari bangsa lainya. Melalui pendidikan diharapkan generasi bangsa terus berinovasi, berkarya dan berwirausaha tidak hanya menjadi entrepreneur tetapi bisa menjadi technopreneur yang siap menghadapi tantangan di era globalisasi (Marlinah, 2019).

3. Inovasi dan riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat

Perguruan tinggi tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat riset dan inovasi. Dengan mendorong penelitian terapan, perguruan tinggi membantu menciptakan solusi lokal terhadap tantangan global, seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan ketahanan pangan. Hal ini mendorong minat masyarakat untuk terlibat dalam dunia akademik yang berdampak langsung pada kehidupan (Syukron, 2016).

4. Perluasan modal sosial dan mobilitas sosial

Perguruan tinggi dapat menjadi jembatan bagi mobilitas sosial. Pendidikan tinggi memberi peluang bagi individu dari latar belakang ekonomi rendah untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan taraf hidup, dan memperbaiki status sosial (Marginson, 2016).

5. Meningkatkan partisipasi melalui diversifikasi jalur pendidikan tinggi

Berbagai bentuk perguruan tinggi seperti universitas, politeknik, dan akademi komunitas memberikan alternatif jalur pendidikan sesuai minat dan kemampuan mahasiswa. Hal ini memperbesar kemungkinan partisipasi karena tersedia pilihan yang fleksibel dari sisi kurikulum, biaya, dan lokasi (Afandi & Rocmah, 2015).

Pembangunan Manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan

Sejak akhir tahun 2015, fokus pembangunan dunia telah beralih dari Tujuan Pengembangan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs) menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Fokus dan tujuan pembangunan negara-negara di dunia menjadi jauh lebih komprehensif dengan penekanan tujuan tidak hanya pada outcome dan kesejahteraan, tetapi juga pada aspek keadilan, inklusivitas, serta cara pencapaian tujuan (Sari et al., 2019).

Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan tersebut, pembangunan manusia memiliki peran yang mendasar karena manusia tidak hanya sebagai pelaku pembangunan, tetapi juga penikmat hasil pembangunan, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup. Oleh karena itu, pembangunan manusia tidak hanya dilakukan pada usia produktif, namun dilaksanakan di sepanjang siklus hidup individu tersebut dengan cakupan pembangunan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

METODOLOGI

Penulisan *policy paper* ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Molesong (2016), metode kualitatif merupakan kegiatan yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek. Metode kualitatif berusaha menjelaskan suatu fenomena dengan seterang-terangnya melalui pengumpulan data yang sebanyak mungkin dan sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data.

Subjek dalam metode kualitatif biasa disebut sebagai narasumber atau informan yang merupakan pihak pemberi informasi terkait data-data dan informasi yang diperlukan oleh penulis.

Teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling strategis, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data (Sugiyono, 2017). Dalam penulisan policy paper pengambilan data dilakukan dengan teknik berikut:

1. Observasi

Observasi yang penulis lakukan adalah observasi terstruktur kepada responden dan narasumber bahwa penulis sedang melaksanakan penggalian data terkait kebijakan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi. Ketika terjun secara langsung ke lapangan, penulis tidak ikut terlibat dalam kegiatan atau aktivitas pada lokasi yang diteliti atau dalam hal ini biasa disebut dengan observasi partisipatif.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan, yaitu wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan data respons, dalam pelaksanaannya pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2017). Pertanyaan wawancara meliputi proses partisipasi pendidikan tinggi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen, atau apa saja yang memiliki relevansi dengan data angka partisipasi pendidikan tinggi, sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh selama penulisan *Policy Paper*. Data dokumentasi juga

diperoleh melalui sumber internet yang merupakan salah satu sumber yang dapat mempermudah dalam memperoleh informasi melalui media *online*. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, penelusuran internet dapat melalui website resmi dari sebuah objek yang akan digali datanya. Data yang dikumpulkan melalui pencarian internet adalah erat kaitannya dengan pemerataan akses Pendidikan Tinggi.

Data ini dianalisis secara kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Hubern, (1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data: Menyaring dan memfokuskan data pada informasi yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian.
2. Penyajian Data: Mengorganisir data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang mudah dianalisis, seperti matriks atau diagram.
3. Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan data dan mengembangkan kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian.
4. Verifikasi: Memastikan kesimpulan didukung oleh data dan konsisten dengan teori yang ada.

Dengan menggunakan teknik analisis data ini, dapat dianalisis data kualitatif secara komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang partisipasi pendidikan tinggi yang sedang dikaji dan memberikan rekomendasi yang berbasis bukti.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan amanah terhadap penjaminan mutu pada perguruan tinggi. Di dalam Pasal 51 memberikan penjelasan bahwa pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, di mana pemerintah diamanatkan untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutunya.

melanjutkan pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting, baik untuk pengembangan individu maupun pembangunan bangsa secara keseluruhan. poin penting berdasarkan keberlanjutan pendidikan tersebut antara lain:

1. Pendidikan tinggi bukan hanya untuk mengejar gelar, tetapi membentuk manusia yang utuh dan siap bersaing di era global.
2. Pendidikan tinggi adalah pilar utama dalam menciptakan inovasi, riset, dan kemajuan teknologi.
3. Pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Pendidikan tinggi juga menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial dan mobilitas ekonomi

Pentingnya keberlanjutan pendidikan tersebut tidak berjalan mulus di provinsi Kalimantan Tengah. faktor utama penyebab Rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi tersebut adalah kondisi sosial ekonomi. Faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap Biaya kuliah bukan hanya soal SPP, tetapi juga meliputi biaya hidup, trans-

portasi, buku, dan tempat tinggal. Bagi keluarga berpenghasilan rendah atau pekerja informal, biaya ini sangat berat dan menjadi prioritas yang dikorbankan.

Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah umumnya juga memiliki akses informasi yang terbatas (internet, konseling sekolah), Kesadaran pendidikan yang rendah karena tidak melihat hasil langsung dari investasi pendidikan serta kecenderungan untuk menikah muda atau langsung bekerja setelah lulus SMA.

Faktor ekonomi juga menyebabkan tidak adanya lembaga pendidikan tinggi di banyak daerah (karena tidak ada permintaan pasar lokal). Kondisi ekonomi yang lemah membatasi kemampuan pemerintah daerah dan swasta dalam membangun infrastruktur dan membuka akses pendidikan tinggi. Bahkan kesadaran pendidikan sering tumbuh lebih tinggi pada keluarga dengan ekonomi menengah ke atas.

ANALISIS KEBIJAKAN

Dalam rangka meningkatkan peran perguruan tinggi dalam meningkatkan pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan perencanaan program-program kegiatan yang selaras dengan peningkatan pendidikan tinggi. Dalam melakukan analisis kebijakan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, penulis menggunakan analisis SWOT, Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) dalam suatu organisasi, analisis SWOT merupakan salah satu alat analisa yang efektif dalam merumuskan strategi pengembangan yang lebih baik.

Dalam kaitannya dengan rendahnya partisipasi pendidikan tinggi, khususnya terkait problem statement kondisi sosial ekonomi masyarakat, analisis SWOT dapat membantu mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang yang ada sebagai berikut:

1. *Strengths* (kekuatan)

- a. Sumber Daya Alam yang melimpah, Kalimantan Tengah kaya akan sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan) yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan potensi beasiswa atau program CSR untuk pendidikan tinggi.
- b. Dukungan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi menunjukkan komitmen dalam pengembangan SDM lokal melalui program pendidikan dan pelatihan vokasional.
- c. Semangat komunitas lokal untuk Pendidikan. Banyak komunitas dan organisasi masyarakat sipil mendorong pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan daerah.

2. *Weaknesses* (kelemahan)

- a. Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi yang Masih Tinggi, Banyak keluarga tidak mampu secara ekonomi untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi, terutama di pedalaman.
- b. Akses dan infrastruktur pendidikan yang terbatas, Masih minimnya perguruan tinggi negeri maupun swasta di wilayah-wilayah kabupaten, ditambah kondisi geografis yang sulit, menjadi kendala utama.
- c. Kurangnya informasi dan sosialisasi Pendidikan Tinggi, Minimnya in-

formasi tentang pentingnya pendidikan tinggi, jalur masuk, beasiswa, dan peluang kerja menyebabkan rendahnya minat melanjutkan studi.

- d. Kualitas pendidikan menengah yang belum merata, Kualitas SMA/SMK sebagai jenjang prasyarat masuk perguruan tinggi masih bervariasi, terutama di daerah-daerah terpencil.

3. *Opportunities* (peluang)

- a. Program Beasiswa dari Pemerintah dan Swasta, Beasiswa seperti KIP Kuliah, LPDP, serta bantuan dari sektor swasta (CSR) bisa mendorong akses ke pendidikan tinggi.
- b. Perluasan Sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan Kuliah Daring, Dengan kemajuan teknologi dan dukungan internet, pendidikan tinggi bisa diakses lebih luas, termasuk di daerah pelosok.
- c. Kemitraan dengan Dunia Industri Lokal, kolaborasi dengan sektor industri di Kalimantan Tengah bisa membuka peluang pendidikan vokasional dan kerja sama riset terapan.
- d. Bonus Demografi, Kalimantan Tengah memiliki proporsi penduduk usia muda yang cukup tinggi, yang menjadi target potensial untuk pengembangan SDM melalui pendidikan tinggi.

4. *Threats* (ancaman)

- a. Urbanisasi dan Brain Drain, lulusan potensial cenderung memilih kuliah dan menetap di kota-kota besar atau luar provinsi, sehingga daerah kehilangan SDM terbaik.

- b. Ketergantungan pada Sektor Ekstraktif, fokus ekonomi pada sektor tambang/perkebunan dapat mengurangi minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi karena pekerjaan lapangan dianggap lebih cepat menghasilkan.
 - c. Ketidakpastian Ekonomi Nasional dan Global, fluktuasi ekonomi bisa memengaruhi alokasi anggaran pendidikan baik dari pemerintah maupun sektor swasta.
 - d. Kesenjangan Digital, keterbatasan akses internet dan perangkat digital di beberapa wilayah menyebabkan pendidikan daring tidak bisa optimal.
- Meningkatkan kualitas SDM lokal
 - Menyasar bidang strategis (kesehatan, pendidikan, teknik, pertanian, dll)
 - Mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi

3. Pembuatan juknis Perluasan Program Afirmasi

Perluasan berarti memperbesar jangkauan dan efektivitas program, dengan langkah-langkah seperti menambah jumlah penerima beasiswa, terutama dari daerah pedalaman dan nonkota, Membuat sistem yang lebih ramah bagi siswa dari sekolah tanpa fasilitas digital. Selain itu juga bisa salam bentuk menghadirkan tim relawan, alumni, atau guru pendamping yang khusus membantu siswa mendaftar. Perluasan program afirmasi juga dapat dilaksanakan dalam bentuk penggunaan data dari desa atau kelurahan, bukan hanya dari DTKS pusat, agar siswa miskin yang tidak terdata secara nasional tetap bisa mendapatkan afirmasi.

4. Kampanye Literasi dan Motivasi Melanjutkan Pendidikan

Program Sosialisasi dan Bimbingan Karier di Sekolah Menengah dengan melibatkan alumni dan tokoh lokal untuk menginspirasi siswa agar melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu program tersebut dapat dilaksanakan dengan Perluasan Program Kampus Mengajar dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, Mahasiswa membantu menyosialisasikan pentingnya pendidikan tinggi di desa-desa terpencil.

KKN tematik sendiri adalah KKN yang memadukan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah di masyarakat melalui konsep pemberdayaan (Farman et al., 2021).

Dari hasil analisis SWOT di atas, maka terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi sebagai berikut:

1. Rektor membuat MoU dengan pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten terkait bantuan transportasi dan akomodasi.

Permasalahan geografis Kalimantan Tengah menjadi problem yang harus diselesaikan dalam mendukung peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, mengingat banyak mahasiswa harus berpindah kota untuk kuliah, subsidi biaya hidup dan transportasi dapat mengurangi hambatan ekonomi.

2. Kemitraan Pendidikan dengan Dunia Industri dan Pemerintah Daerah
Kemitraan dengan BUMD/BUMN/Swasta

Kebijakan ini akan membuka akses beasiswa, kerja sama proyek penelitian, dan lapangan kerja pasca studi. Tujuan dari kebijakan ini antara lain:

5. Penerapan pendidikan jarak jauh
Penerapan pendidikan jarak jauh (PJJ) dengan konsep e-learning kini telah memberikan kesempatan bagi institusi perguruan tinggi untuk melaksanakan program pembelajaran tersebut dengan jaminan mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain menekan biaya pendidikan, PJJ memberikan aksesibilitas bagi masyarakat di daerah yang jauh dari institusi pendidikan tinggi ataupun yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka (regular).

Kementerian Agama Pada 21 Mei 2024 telah meresmikan transformasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC). Hal tersebut merupakan upaya internasionalisasi PTKIN di bawah naungan Kementerian Agama. Cyber Islamic university (CIU) merupakan gagasan Kemenag yang bermaksud untuk membuat kampus islam virtual yang sepenuhnya menggunakan sistem daring (dalam jaringan) (Fadli & Miftah, 2023) through the Ministry of Religion, has established the Islamic University cyber policy as one of the Ministry of Religion's 7 policy priorities. The cyber-Islamic university policy is motivated by the issue of equal distribution of education (especially Islamic education).

Dengan demikian, PTKIN kini dapat menjangkau anak bangsa yang memerlukan pendidikan tinggi, terutama pendidikan tinggi keagamaan Islam, hingga ke daerah pelosok. Kondisi ini harapannya berkembang di seluruh Indonesia khususnya Kalimantan Tengah dalam mensukseskan salah satu dari

tujuh program menteri Agama serta meningkatkan jumlah Perguruan Tinggi Islam yang menerapkan konsep tersebut. Potensi ini jug disertai dengan tantangan untuk meningkatkan daya serap atau pemahaman peserta didik.

6. Vokasi Berbasis Desa
Sistem vokasi berbasis desa adalah strategi pendidikan keterampilan (vokasi) yang berakar pada potensi lokal, dilaksanakan di atau dekat wilayah pedesaan, dan diarahkan untuk:
- Menyiapkan tenaga kerja lokal yang terampil
 - Mendukung ekonomi desa berbasis sumber daya setempat
 - Mencegah urbanisasi berlebihan dengan membuka peluang kerja di desa
 - Meningkatkan akses pendidikan tinggi non-akademik bagi masyarakat desa.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis kebijakan di atas, penulis mengajukan beberapa alternatif kebijakan kepada pemangku kebijakan sebagai acuan dalam mendukung tercapainya peningkatan partisipasi pendidikan tinggi. Adapun pilihan kebijakan mempertimbangkan enam komponen sebagaimana teori William N. Dunn berikut:

1. Efektivitas: Sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya
2. Efisiensi: Perbandingan antara hasil yang diperoleh dan sumber daya yang digunakan
3. Responsivitas: Seberapa baik kebijakan memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Kecukupan: seberapa jauh alternatif pilihan dapat memuaskan kebutuhan

5. Perataan: Kebijakan yang berdasar pada perataan adalah kebijakan yang penerapannya secara adil
 6. Ketepatan: apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak
- Acuan dalam menganalisis data menggunakan pendekatan *need assessment* dengan menentukan peringkat/ranking dan skor 1 sampai 10 sesuai dengan kebutuhan. Adapun skoring pemilihan kebijakan dari lima pilihan kebijakan terdapat pada tabel 4-8.

Tabel 4. Skoring Alternatif Kebijakan 1

Kriteria	Efektif	Efisien	Responsivitas	Kecukupan	Perataan	Ketepatan	Total
Rektor membuat MoU dengan Pemerintah Kabupaten Bantuan Transportasi dan Akomodasi yang dapat mengatasi permasalahan geografis yang belum sepenuhnya terhubung dengan infrastruktur modern. Kondisi geografis ini menciptakan tantangan besar dalam aksesibilitas, khususnya dalam hal akses ke layanan pendidikan menengah dan tinggi	6	8	8	7	7	7	43
Acuan rekomendasi alternatif kebijakan 1 berdasarkan teori William N. Dunn							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektif: kebijakan ini berpotensi efektif, namun memerlukan kontrak kerjasama dengan instansi lain di luar Pendidikan Tinggi 2. Efisien: Kebijakan ini dinilai efisien dari internal perguruan tinggi karena dapat melakukan cost sharing dalam pembiayaan perkuliahan melalui beasiswa tersebut 3. Responsivitas: kebijakan ini cukup responsif khususnya dalam mengatasi permasalahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 4. Kecukupan: kebijakan ini merupakan langkah awal yang baik dalam menjawab kebutuhan dari problem statemen di atas 5. Perataan: kebijakan ini dapat di implementasikan secara merata bagi masyarakat yang kurang mampu, namun perlu rekrutmen secara selektif 6. Ketepatan: Kebijakan ini dinilai sudah tepat bagi masyarakat yang memerlukan biaya pendidikan tinggi 							
Solusi Penyelesaian							
Secara keseluruhan, kebijakan Rektor ini dapat memberi dampak yang positif terhadap permasalahan pemerataan pendidikan tinggi, namun pelaksanaannya tergantung kesiapan anggaran dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten serta prioritas program yang telah ditentukan							

Tabel 5. Skoring Alternatif Kebijakan 2

Kriteria	Efektif	Efisien	Responsivitas	Kecukupan	Perataan	Ketepatan	Total
Kemitraan Pendidikan dengan Dunia Industri dan Pemerintah Daerah Kemitraan dengan BUMD/BUMN/Swasta guna membuka akses beasiswa, kerja sama proyek penelitian, dan lapangan kerja pasca studi	6	8	7	8	6	7	42
Acuan rekomendasi alternatif kebijakan 2 berdasarkan teori William N. Dunn							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektif: kebijakan ini berpotensi efektif, namun memerlukan kontrak kerjasama dengan instansi lain di luar Pendidikan Tinggi 2. Efisien: Kebijakan ini dinilai efisien dari internal perguruan tinggi karena dapat melakukan cost sharing dalam pembiayaan perkuliahan melalui beasiswa tersebut 3. Responsivitas: kebijakan ini cukup responsif khususnya dalam mengatasi permasalahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 							

<p>4. Kecukupan: kebijakan ini merupakan langkah awal yang baik dalam menjawab kebutuhan dari problem statemen di atas</p> <p>5. Perataan: kebijakan ini dapat di implementasikan secara merata, namun tetap bergantung pada kuota mitra dalam memberikan bantuannya</p> <p>6. Ketepatan: Kebijakan ini dinilai sudah tepat dalam mengatasi kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi masyarakat yang memerlukan biaya pendidikan tinggi</p>
Solusi Penyelesaian
Kebijakan ini dapat menjawab problem statement yang ada, dan berpotensi meningkatkan pastisipasi pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah, namun kebijakan ini tetap bergantung pada mitra yang mau melaksanakan MoU

Tabel 6. Skoring Alternatif Kebijakan 3

Kriteria	Efektif	Efisien	Respon-sivitas	Kecuku-pan	Pera-taan	Ketepa-tan	Total
Pembuatan juknis Perluasan Program Afirmasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang mengatur perluasan jangkauan dan efektivitas program, seperti penambahan jumlah penerima beasiswa, membuat sistem yang lebih ramah bagi siswa dari sekolah tanpa fasilitas digital, menghadirkan tim relawan, alumni, atau guru pendamping yang khusus membantu siswa mendaftar.	8	8	7	7	8	7	45
Acuan rekomendasi alternatif kebijakan 3 berdasarkan teori William N. Dunn							
<p>1. Efektif: kebijakan ini berpotensi efektif dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi hingga masyarakat pedesaan</p> <p>2. Efisien: Kebijakan ini berpotensi efisien dengan melibatkan stakeholder lain seperti alumni yang bersedia mengabdikan untuk perguruan tingginya</p> <p>3. Responsivitas: kebijakan ini cukup responsif dalam menjawab problem statement di atas melalui kebijakan direktorat yang membidangi pendidikan</p> <p>4. Kecukupan: kebijakan ini dinilai cukup memberikan kepuasan terhadap keluhan yang dialami masyarakat ketika akan melanjutkan ke pendidikan tinggi</p> <p>5. Perataan: kebijakan ini memungkinkan untuk di terapkan secara merata kepada calon mahasiswa</p> <p>6. Ketepatan: Berpotensi untuk merata, namun diperlukan banyak SDM dalam implementasinya</p>							
Solusi Penyelesaian							
Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini memiliki potensi yang baik dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi, penerapannya dapat dilakukan secara merata serta berpotensi diterapkan secara efektif dan efisien. Masyarakat akan memiliki akses dalam menjangkau pendidikan tinggi baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan							

Tabel 7. Skoring Alternatif Kebijakan 4

Kriteria	Efektif	Efisien	Respon-sivitas	Kecuku-pan	Pera-taan	Ketepa-tan	Total
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam membuat juknis Kampanye Literasi dan Motivasi Melanjutkan Pendidikan yang diterapkan dalam kegiatan KKN tematik	7	8	6	6	8	7	42
Acuan rekomendasi alternatif kebijakan 4 berdasarkan teori William N. Dunn							
<p>1. Efektif: kebijakan ini berpotensi cukup efektif dalam mengedukasi masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan tinggi</p> <p>2. Efisien: Kebijakan ini cukup efisien dalam pelaksanaannya, tanpa memerlukan anggaran yang besar</p> <p>3. Responsivitas: kebijakan ini kurangresponsif, mengingat masih ada satu persoalan masyarakat yaitu terkait biaya pendidikan tinggi</p>							

<p>4. Kecukupan: kebijakan ini langsung dapat menjawab kebutuhan dari problem statement di atas, namun belum secara menyeluruh mengingat permasalahan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait biaya pendidikan</p> <p>5. Perataan: kebijakan ini berpotensi merata mengingat KKN mahasiswa IAIN Palangka Raya dapat tersebar di seluruh Kalimantan Tengah</p> <p>6. Ketepatan: kebijakan ini dinilai tepat dalam memberi motivasi kepada masyarakat, namun juga perlu diberi solusi terkait kendala biaya pendidikan</p>
Solusi Penyelesaian
Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini berpotensi efektif dan efisien dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, namun belum secara menyeluruh mengingat permasalahan kondisi sosial ekonomi masyarakat

Tabel 8. Skoring Alternatif Kebijakan 5

Kriteria	Efektif	Efisien	Respon- sivitas	Kecuku- pan	Pera- taan	Ketepa- tan	Total
Penerapan pendidikan jarak jauh, Menteri Agama perlu menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang penetapan IAIN Palangka Raya menjadi Islamic Cyber University yang ada di Kalimantan Tengah	7	5	6	9	8	6	41
Acuan rekomendasi alternatif kebijakan 5 berdasarkan teori William N. Dunn							
<p>1. Efektif: kebijakan ini berpotensi efektif, namun arus memiliki tekad yang kuat dalam pelaksanaannya</p> <p>2. Efisien: Kebijakan ini dinilai kurang efisien karena perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan PJJ</p> <p>3. Responsivitas: kebijakan ini cukup responsif, namun masih banyak masyarakat yang kurang responsif terhadap perkembangan teknologi PJJ</p> <p>4. Kecukupan: kebijakan ini cukup menjawab kebutuhan dari problem statement di atas</p> <p>5. Perataan: Kebijakan ini dapat di implementasikan cukup merata pada masyarakat Kalimantan Tengah</p> <p>6. Ketepatan: kebijakan ini layak untuk diterapkan, namun perlu proses yang panjang dalam memenuhi segala persyaratan untuk menjadikan IAIN Palangka Raya sebagai Islamic Cyber University</p>							
Solusi Penyelesaian							
Kebijakan Menteri Agama ini dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah, namun masih banyak persyaratan dan pemenuhan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan PJJ, sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat dalam menerapkan kebijakan tersebut							

Tabel 9. Skoring Alternatif Kebijakan 6

Kriteria	Efektif	Efisien	Respon- sivitas	Kecuku- pan	Pera- taan	Ketepa- tan	Total
Rektor IAIN Palangka Raya membuat MoU dengan pemerintah kabupaten terkait Sistem vokasi berbasis desa dimana strategi pendidikan keterampilan (vokasi) yang berakar pada potensi lokal, dilaksanakan di atau dekat wilayah pedesaan	6	7	8	8	7	7	43
Acuan rekomendasi alternatif kebijakan 5 berdasarkan teori William N. Dunn							
<p>1. Efektif: kebijakan ini berpotensi efektif, namun memerlukan kontrak kerjasama dengan instansi lain di luar Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Efisien: Kebijakan ini dinilai efisien namun diperlukan sedikit pembiayaan terkait penggalian data potensi desa</p> <p>3. Responsivitas: kebijakan ini kurang merespon secara langsung, namun cukup menjadi alternatif dari permasalahan di atas</p> <p>4. Kecukupan: kebijakan ini merupakan langkah awal yang baik dalam menjawab kebutuhan dari problem statemen di atas</p>							

5. Perataan: kebijakan ini dinilai kurang merata mengingat setiap desa belum tentu memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan
6. Ketepatan: Kebijakan ini dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi masyarakat yang memerlukan biaya pendidikan tinggi

Solusi Penyelesaian

Kebijakan rektor dapat menjawab dari problem statement di atas, namun kebijakan ini tetap bergantung pada mitra yang mau melaksanakan MoU

Berdasarkan tabel skoring dari enam alternatif kebijakan di atas, maka penulis memilih alternatif kebijakan yang ketiga sebagai rekomendasi kebijakan, yaitu pembuatan Pembuatan juknis Perluasan Program Afirmasi. Regulasi ini ke depannya dapat menjadi instrumen penting untuk membuka pintu akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang selama ini terkendala ekonomi, lokasi, dan informasi. Namun agar efektif, program ini harus diperluas dan diperkuat, bukan hanya dari segi kuota, tetapi juga dari pendekatan sosial dan teknis agar benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dari hasil pembahasan *Policy Paper* ini, penulis menyimpulkan bahwa rendahnya

angka partisipasi pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah disebabkan karena kondisi sosial ekonomi. Tingkat kemiskinan relatif masih tinggi membuat banyak keluarga tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan tinggi, terutama untuk biaya non-akademik seperti transportasi, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup selama kuliah.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi melalui perbaikan kondisi sosial ekonomi yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu membuat juknis perluasan program afirmasi yang diharapkan menjadi solusi dan alternatif kebijakan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rendahnya partisipasi pendidikan tinggi.

REFERENSI

- Afandi, R., & Rocmah, L. I. (2015). Pramuka Sebagai Wadah Mengembangkan Life Skill Mahasiswa Calon Guru Pada Perguruan Tinggi LPTK. *Pedagogia : Jurnal Pendidikan*, 4(2), 135–140. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v4i2.16>
- Ardhy, A. A. S. (2024). Respons Pendidikan Islam terhadap Radikalisme, Toleransi, dan Pluralisme di Era Kontemporer. *Jurnal Ulul Albab*, 28(2), 126. <https://doi.org/10.31764/jua.v26i2.23560>
- Bappeda Provinsi Kalteng. (2023). *Analisis Disparitas Pendidikan Antarkabupaten*.
- BPS. (2022a). *Profil Kemiskinan dan Pendidikan di Kalimantan Tengah*. BPS Kalteng.
- BPS. (2022b). *Susenas Kalimantan Tengah*.
- BPS Kalimantan Tengah. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023*.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisa Kebijakan Publik*. PT. Prasetya Widia Pratama.

- Fadli, F., & Miftah, M. (2023). Kebijakan Cyber Islamic University Dalam Peningkatan Sdm Di Era Society 5.0. *Manajemen Pendidikan*, 18(2), 141–151. <https://doi.org/10.23917/jmp.v18i2.23287>
- Farman, F., Chairuddin, C., Herlina, H., Marniati, M., Hali, F., & Nasrum, A. (2021). Kkn Tematik: Peningkatan Kualitas Hidup Bersih Dan Sehat Masyarakat Desa Lapao-Pao Kabupaten Kolaka. *Jurnal Al Basirah*, 1(2), 117–126. <https://doi.org/10.58326/jab.v1i2.24>
- Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and education: All means all. Paris. (2020). In *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and education: All means all*. Paris. <https://doi.org/10.54676/jjnk6989>
- Guntoro, D. W., & Sholekhah, I. (2023). SES (Socio-Economis Status) dalam Pengambilan Keputusan Melanjutkan Pendidikan Tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 48–54. <https://doi.org/10.33084/neraca.v9i1.5787>
- Humiati, H., & Budiarti, D. (2020). Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.51213/jmm.v3i1.46>
- Indonesia Mengajar. (2021). *Catatan Lapangan Wilayah Kalimantan Tengah: Tantangan Akses dan Informasi Pendidikan*.
- Kemendikbudristek. (2021). *Pemetaan Minat Lanjut Studi di Daerah 3T*.
- Kemendikbudristek. (2023). *Kajian Sosial Pendidikan Daerah*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia*.
- Kemkominfo. (2022). *Survei Indeks Literasi Digital Nasional*.
- Marginson, S. (2016). *Higher education and the common good*. Melbourne University Press.
- Marlinah, L. (2019). Pentingnya Peran Perguruan Tinggi dalam Mencetak SDM yang Berjiwa Inovator dan Technopreneur Menyongsong Era Society 5.0. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 2(3), 17–25. <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/647>
- Miles, B. M., & Hubern, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP.
- Sari, R. K., Bangapadang, S., & Hidayat, C. (2019). Analisis Peran Perguruan Tinggi Terhadap Bonus Demografi di Indonesia. *Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Dan Tingkat Ekonomi Tentang Kejadian Stunting*, 3(2), 14–15.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Syukron, B. (2016). Implementasi Manajemen Mutu Terpadu (Studi Transformatif Pada Perguruan Tinggi). *Jurnal Penelitian*, 10(2), 231–252. <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1783>
- Trow, M. (1973). *Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education*. Carnegie Commission on Higher Education.